

**PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* DAN
FINANCIAL DISTRESSED TERHADAP LUAS
PENGUNGKAPAN**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan program sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

**AGY PRAMUNIA S.
NIM. C2C006007**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2010**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : AGY PRAMUNIA SAPUTRI
Nomor Induk Mahasiswa : C2C006007
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE*
DAN *FINANCIAL DISTRESSED* TERHADAP
LUAS PENGUNGKAPAN SUKARELA**

Dosen Pembimbing : Tri Jatmiko Wahyu Prabowo., S.E., M.Si., Akt.

Semarang, 2010

Dosen Pembimbing

(Tri Jatmiko Wahyu P, S.E., M.Si., Akt.)
NIP. 19711026 200003 1001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : AGY PRAMUNIA SAPUTRI

Nomor Induk Mahasiswa : C2C006007

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE*
DAN *FINANCIAL DISTRESSED* TERHADAP
LUAS PENGUNGKAPAN SUKARELA**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 2010.

Tim Penguji:

1. Tri Jatmiko Wahyu P., SE, MSi., Akt. (.....)
2. H. Tarmizi Achmad MBA., Ph. D, Akt. (.....)
3. Drs. H. M. Didik Ardiyanto, MSi., Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini, saya AGY PRAMUNIA SAPUTRI menyatakan bahwa skripsi dengan judul *PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN FINANCIAL DISTRESSED TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN SUKARELA*, adalah asli tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan universitas batal saya terima.

Semarang, September 2010

Yang membuat pernyataan,

AGY PRAMUNIA SAPUTRI
NIM. C2C006007

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine whether voluntary disclosure is associated with financial status, corporate governance and ownership patterns. Factors that are used consist of distressed status, corporate governance structure (ownership structure and committee audit), leverage, profitability, size of firms.

The aims of this study using cross sectional series data covering the period 2007-2008. The samples of this study are consists of forty three financial distressed firms which joined with forty three nonfinancial distressed firms. Data analyzed classic assumption test, and the examination of the hypothesis use model of multiple linier regression and paired sample t-test.

Result show that financially distressed firms had lower voluntary disclosures than their matched healthy firms. Institutional ownership, Managerial ownership and committee audit, on the other hand, are not associated with voluntary disclosure. Size and profitability had significant relation with the extent of voluntary disclosure.

Key words: voluntary disclosure, distressed status, corporate governance structure

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah luas pengungkapan sukarela berhubungan dengan *distressed status*, struktur kepemilikan dan komite audit.. Faktor-faktor yang digunakan untuk menguji luas pengungkapan sukarela adalah *distressed status*, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komite audit.

Penelitian ini menggunakan data *cross sectional* periode tahun 2007-2008. Sampel penelitian ini terdiri dari empat puluh tiga perusahaan *financial distressed* yang dipasangkan dengan empat puluh tiga perusahaan *nonfinancial distressed*. Analisis data dilakukan dengan uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis dengan *paired sample t-test* dan regresi linier berganda.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa luas pengungkapan sukarela pada *financially distressed firms* lebih rendah daripada luas pengungkapan sukarela pada *nonfinancially distressed firms*. Sedangkan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan komite audit tidak berhubungan dengan luas pengungkapan sukarela.

Keyword: Luas Pengungkapan Sukarela, *Distressed Status*, Struktur *Corporate Governance*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah robbil 'alamiin. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga penelitian berjudul *PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN DISTRESSED STATUS TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN SUKARELA* dapat terselesaikan.

Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, pengarahan, dan dukungan dari berbagai pihak kepada penulis. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang Mahapengasih dan Mahapenyayang yang telah memberikan nikmat yang tak pernah berujung dan cobaan yang penuh dengan pelajaran yang sangat berharga.
2. Bapak, Ibu tercinta. Orang tua, guru, dan suri teladan yang baik, yang terus mendoakan dan selalu memotivasi. Terima kasih untuk kasih sayang sepanjang masa yang tak terganti dan tak terbalaskan. Juga untuk adek-adekku tersayang, Linda dan Eviga.
3. Bapak Drs. H. Moch. Chabachib, M.Si., Akt., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
4. Bapak Prof. Dr. M. Syafruddin, M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro.

5. Bapak Tri Jatmiko Wahyu Prabowo SE, M.Si., Akt., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan petunjuk sehingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. H. Arifin M.Com, Hons., Akt. selaku dosen wali serta bapak ibu dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro atas ilmu yang diberikan.
7. Teman-teman seperjuangan dalam organisasi “KESMATERS”. *I'm proud to be a part of the team.*
8. Teman-teman “Kos Ijo” yang memberi semangat dan dukungan (Mba Eva, Maya, Daning, Amalia, Mba Putri, Inda, Ifa, Siska, Wiki, Dina).
9. *My Besties* in d'campus (Elis, Winda, Nia, Eka, Efi, Yeni, Nita, Iswa) sahabat tak mengenal kata akhir, best friend forever.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang selama masa penyusunan skripsi ini telah banyak membantu. *Arigato Gozaimasu.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagai suatu sumbangan ilmu. Agar menjadi sesuatu yang mempunyai arti, penulis berharap atas saran dan kritik sehingga skripsi ini menjadi lebih bermanfaat.

Semarang, September 2010

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAKSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 Teori Agensi.....	11
2.1.2 Teori Sinyal.....	14
2.1.3 <i>Corporate Governance</i>	16

2.1.4	<i>Financial Distressed</i>	18
2.1.5	Luas Pengungkapan Sukarela.....	19
2.1.6	Struktur Kepemilikan.....	22
2.1.7	Komite Audit.....	22
2.2	Penelitian Terdahulu.....	24
2.3	Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis.....	24
2.3.1	<i>Financial Distressed</i> dan Pengungkapan Sukarela..	24
2.3.2	Komite Audit dan Pengungkapan Sukarela.....	30
2.3.3	Kepemilikan Manajerial dan Pengungkapan Sukarela.....	31
2.3.4	Kepemilikan Institusional dan Pengungkapan Sukarela.....	33
BAB III	METODE PENELITIAN	36
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	36
3.1.1	Variabel Dependen.....	36
3.1.2	Variabel Independen.....	38
3.1.3	Variabel Kontrol.....	40
3.2	Populasi dan Sampel.....	43
3.3	Jenis dan Metode Pengumpulan Data.....	43
3.4	Metode Analisis.....	44
3.4.1	Statistik Deskriptif.....	44

3.4.2	Uji Asumsi Klasik.....	44
3.4.2.1	Uji Normalitas.....	44
3.4.2.2	Uji Multikolonieritas.....	45
3.4.2.3	Uji Autokorelasi.....	46
3.4.2.4	Uji Heterokedastisitas.....	46
3.5	Pengujian Hipotesis.....	47
3.5.1	Paired Sample T-Test.....	47
3.5.2	Analisis Regresi Berganda.....	48
3.5.2.1	Koefisien Determinasi.....	49
3.5.2.2	Uji F.....	50
3.5.2.3	Uji Statistik T.....	50
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
4.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	51
4.2	Analisis Data.....	52
4.2.1	Statistik Deskriptif.....	52
4.2.2	Hasil Uji Asumsi Klasik.....	55
4.2.2.1	Hasil Uji Normalitas.....	55
4.2.2.2	Hasil Uji Multikolonieritas.....	57
4.2.2.3	Hasil Uji Autokorelasi.....	58
4.2.2.4	Hasil Uji Heterokedastisitas.....	58
4.2.3	Hasil Pengujian Paired Sample T-test.....	60
4.2.4	Hasil Pengujian Regresi Berganda.....	62

4.2.4.1 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	62
4.2.4.2 Hasil Uji F.....	63
4.2.4.3 Hasil Uji T.....	64
4.3 Interpretasi Hasil.....	67
4.3.1 Pengaruh <i>Distressed Status</i> Terhadap Luas Pengungkapan Sukarela.....	67
4.3.2 Pengaruh Komite Audit terhadap Luas Pengungkapan Sukarela.....	68
4.3.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Luas Pengungkapan Sukarela.....	69
4.3.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Luas Pengungkapan Sukarela.....	70
BAB V PENUTUP.....	72
5.1 Kesimpulan.....	72
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	75
5.3 Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu..... 25
Tabel 4.1	Statistik Deskriptif Variabel Penelitian..... 53
Tabel 4.2	Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov..... 56
Tabel 4.3	Hasil Uji Multikolinieritas..... 57
Tabel 4.4	Hasil Uji Durbin-Watson..... 58
Tabel 4.5	Hasil Uji Park..... 59
Tabel 4.6	Hasil Uji Statistik <i>Paired Samples</i>
Tabel 4.7	Hasil Uji Paired Samples Correlations..... 61
Tabel 4.8	Hasil Uji Paired Samples Test..... 61
Tabel 4.9	Hasil Uji Koefisien Determinasi..... 62
Tabel 4.10	Hasil Uji Signifikansi Simultan..... 63
Tabel 4.11	Hasil Uji Statistik t..... 64
Tabel 4.12	Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis..... 66

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Model Kerangka Pemikiran.....	34
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Penelitian.....	24
Gambar 4.1 Grafik <i>Scatterplot</i>	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Selama sepuluh tahun terakhir ini, istilah *corporate governance* semakin populer. Hal ini karena *corporate governance* merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis. Fitdini (2009) menyatakan bahwa masalah *good corporate governance* telah menjadi perhatian yang menarik sejak terjadinya krisis keuangan di negara-negara Asia yang terjadi pada tahun 1997, hal ini diyakini muncul karena kegagalan penerapan *good corporate governance*. Contohnya seperti sistem regulasi yang kurang mendukung, standar akuntansi dan audit yang tidak konsisten, praktik perbankan yang lemah, serta pandangan *board of directors* yang kurang peduli terhadap hak-hak pemegang saham minoritas.

Achmad Syakhroza (2002) dalam studi penerapan OECD (*Organization of Economic Cooperation and Development*) mendefinisikan *corporate governance* adalah suatu sistem yang dipakai *board* untuk mengarahkan dan mengendalikan serta mengawasi (*directing, controlling, and supervising*) pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis, dan produktif dengan prinsip-prinsip transparan, *accountable, responsible, independent*, dan *fairness* dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Menurut

Rachmawati (2009) dengan adanya prinsip-prinsip *corporate governance* menunjukkan indikasi bahwa pemegang saham mendapatkan informasi yang benar dan tepat waktu serta perusahaan wajib mengungkapkan informasi mengenai kinerja.

Pengungkapan informasi kinerja pada laporan tahunan perusahaan bertujuan untuk mencerminkan tingkat akuntabilitas, responsibilitas, dan transparansi entitas kepada investor dan *stakeholders* lainnya. Selain itu, pengungkapan tersebut bertujuan untuk menjalin hubungan komunikasi yang baik dan efektif antara perusahaan dengan publik dan *stakeholders* lainnya. Ghozali dan Chariri (2005) menyatakan konsep pengungkapan yang umumnya diusulkan yaitu pengungkapan yang cukup (*adequate*), wajar (*fair*), dan lengkap (*full*). Pengungkapan cukup (*adequate*) merupakan pengungkapan minimal yang harus disajikan agar laporan keuangan tidak menyesatkan. Pengungkapan secara wajar menunjukkan pengungkapan yang mengandung sasaran etis dengan menyediakan informasi yang layak terhadap investor potensial. Pengungkapan yang lengkap mensyaratkan perlunya penyajian semua informasi yang relevan.

Pengungkapan informasi perusahaan yang berkualitas lengkap dalam laporan keuangan sangat diperlukan, karena hal ini memberikan manfaat yang optimal bagi pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan (Rachmawati, 2009). Pengungkapan informasi yang baik dapat mempengaruhi mekanisme *corporate governance* karena ada transparansi yang terkandung di

dalam pengungkapan informasi. Secara umum terdapat enam prinsip *corporate governance* dalam prinsip-prinsip OECD (*Organization of Economic Cooperation Development*) mengenai *corporate governance*. Keenam prinsip ini menjelaskan hal-hal yang mencakup kerangka dasar *corporate governance*, hak pemegang saham, kesetaraan perlakuan pemegang saham, peranan *stakeholders*, transparansi, dan tanggung jawab dewan komisaris. Sedangkan dalam pedoman umum *good corporate governance* Indonesia terdapat lima prinsip dasar pengelolaan perusahaan yang baik yaitu keadilan (*fairness*), transparansi (*transparency*), independensi, akuntabilitas, dan *responsibility*.

Dengan adanya penerapan prinsip *corporate governance* yang baik akan memberikan keterbukaan informasi yang akurat dan tepat waktu, kejelasan fungsi dan tanggung jawab organ perusahaan, kepatuhan peraturan yang berlaku. Menurut keputusan ketua BAPEPAM Kep-134/BL/2006, perusahaan harus membuat laporan tahunan. Pengungkapan informasi perusahaan terdiri dari dua jenis yaitu *mandatory disclosure* dan *voluntary disclosure*. *Mandatory disclosure* merupakan pengungkapan informasi yang wajib diberitahukan suatu perusahaan sebagaimana diatur dalam ketentuan BAPEPAM Kep-40/BL/2007 tentang pengungkapan informasi dalam laporan tahunan. Pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) merupakan pengungkapan informasi di luar pengungkapan wajib yang diberikan perusahaan secara sukarela oleh perusahaan kepada para pemakai laporan

keuangan. Pengungkapan sukarela tidak diwajibkan oleh peraturan sehingga perusahaan bebas memilih jenis informasi yang akan diungkapkan, yang dipandang manajemen relevan dalam membantu pengambilan keputusan (Yularto dan Chariri, 2003).

Pengungkapan sukarela merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kredibilitas pelaporan keuangan perusahaan dan untuk membantu investor dalam memahami strategi bisnis perusahaan (Healy dan Palepu, 1993 dalam Yularto dan Chariri, 2003). Pengungkapan sukarela meliputi gambaran strategi perusahaan dalam jangka panjang, indikator-indikator nonkeuangan yang penting dan bermanfaat untuk keefektivitasan implementasi strategi perusahaan dan berguna dalam membahas hubungan antara indikator-indikator penting tersebut dengan laba yang akan datang (Yularto dan Chariri, 2003). Dengan adanya pengungkapan sukarela diharapkan para pemakai laporan keuangan akan semakin lengkap informasinya dalam memahami kegiatan operasional perusahaan dan semakin menunjukkan transparansi perusahaan.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Nugrahadi (2008) mengenai pengungkapan sukarela menunjukkan hasil yang tidak konsisten dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Hasil penelitian Nugrahadi (2008) menemukan bahwa komposisi dewan komisaris independen, kepemilikan saham manajerial, dan kepemilikan saham *blockholder* tidak mempunyai hubungan yang signifikan terhadap indeks pengungkapan sukarela. Kepemilikan *blockholder* adalah persentase saham yang dimiliki oleh

pemegang saham dari luar perusahaan di atas lima persen. Sedangkan penelitian Hadi dan Sabeni (2002) menghasilkan bukti bahwa komposisi dewan komisaris, ukuran perusahaan, operasi perusahaan, dan jenis industri berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela. Hal ini disebabkan luas pengungkapan sukarela antara perusahaan yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Perbedaan ini dikarenakan oleh masing-masing industri memiliki karakteristik berbeda sehingga resiko masing-masing industri juga berbeda-beda (Hadi dan Sabeni, 2002).

Menurut teori agensi, terdapat pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian dalam suatu perusahaan yang dapat menimbulkan konflik antara prinsipal dan agen. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya *agency cost*. Jensen dan Meckling (1976) berpendapat bahwa perilaku *moral hazard* dan asimetri informasi dapat dicegah melalui perjanjian dengan memberikan insentif berupa kompensasi keuangan yang diperhitungkan sebagai *agency cost*, sehingga manajer akan termotivasi untuk menyediakan pengungkapan sukarela untuk mengurangi *agency cost*. Biaya untuk pengawasan oleh pemegang saham, biaya yang dikeluarkan oleh manajemen untuk menghasilkan laporan yang transparan, termasuk biaya audit yang independen dan pengendalian internal merupakan *agency cost*.

Menurut Hadi dan Sabeni (2002) dalam mengambil keputusan untuk melakukan pengungkapan, perusahaan akan memperhatikan manfaat dan biaya yang ditimbulkannya. Perusahaan akan mengungkapkan informasi

secara sukarela jika manfaat yang diperoleh dari pengungkapan informasi lebih besar dari biayanya. Manfaat pengungkapan tersebut diperoleh karena pengungkapan informasi perusahaan akan membantu investor dan kreditor dalam memahami kondisi perusahaan dan membantu dalam pengambilan keputusan investasi. Bila manfaat yang akan diperoleh dengan pengungkapan informasi tersebut lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan untuk mengungkapkannya maka perusahaan akan dengan sukarela mengungkapkan informasi tersebut.

Penerapan *corporate governance* merupakan salah satu alat untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas yang diperkirakan berhubungan dengan pengungkapan sukarela. Menurut Ho dan Wong (2001) independensi komite audit juga menjadi penentu luas pengungkapan sukarela di Hong Kong. Di samping itu komisararis independen juga berpengaruh, semakin besar proporsi komisararis independen maka tingkat pengawasan manajerial akan semakin efektif dan kemudian perusahaan lebih banyak melakukan pengungkapan sukarela (Eng dan Mak, 2003). Dalam penelitian Birt et.al. (2006) dijelaskan bahwa pemegang saham besar memiliki peran yang besar dalam mengawasi dan mengendalikan perusahaan serta memiliki kewajiban implisit terhadap pemegang saham yang lain dalam memastikan bahwa perusahaan berada dalam kondisi yang paling menguntungkan bagi seluruh pemegang saham. Dalam hal ini, pemegang saham yang besar mempunyai

kemampuan dalam mengurangi masalah agensi di perusahaan dengan cara mempengaruhi pengungkapan sukarela yang dibuat oleh perusahaan.

Teori sinyal menyatakan bahwa perusahaan yang sehat cenderung untuk mengungkapkan informasi lebih banyak daripada perusahaan yang mengalami *financial distressed* (Ross, 1979; Nasir dan Abdullah, 2004). Hal ini berarti bahwa perusahaan yang mengalami *financial distressed* akan mengungkapkan informasi lebih sedikit daripada perusahaan yang sehat keuangannya. Haniffa dan Cooke (2002) menunjukkan bahwa profitabilitas, dan indikator jenis berita berhubungan positif dengan tingkat pengungkapan sukarela. Perusahaan yang memiliki *good news* dapat ditandai dengan perolehan laba tinggi maupun profitabilitas tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi tambahan yang bersifat *nonmandatory* guna menunjukkan kinerja perusahaan yang baik. Dengan demikian, diprediksi bahwa perusahaan yang finansialnya tertekan memiliki motivasi yang lebih kecil untuk mengungkapkan informasi secara sukarela dari perusahaan yang sehat secara finansial.

Penelitian mengenai pengungkapan sukarela telah banyak dilakukan misalnya Ho dan Wong (2001), Chau dan Gray (2002), Haniffa dan Cooke (2002), Eng dan Mark (2003) yang menghasilkan faktor-faktor penentu pengungkapan sukarela di wilayah Asia. Namun, penelitian yang mengkaitkan pengaruh struktur *corporate governance* dan *distressed status* terhadap luas pengungkapan sukarela belum banyak dilakukan. Penelitian yang dilakukan Hadi dan Sabeni (2002) meneliti tentang komposisi dewan komisaris, komite

audit, ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, skala operasi perusahaan, dan jenis industri yang mempengaruhi luas pengungkapan sukarela. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komposisi dewan komisaris, ukuran perusahaan, skala operasi perusahaan dan jenis industri mempengaruhi luas pengungkapan sukarela secara signifikan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang penelitian tersebut, maka penelitian ini mengambil judul **”Pengaruh *Corporate Governance* dan *Financial Distressed* Terhadap Luas Pengungkapan Sukarela.** Penelitian ini berdasarkan pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nasir dan Abdullah (2004) mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap luas pengungkapan sukarela pada perusahaan yang dikategorikan sebagai *financial distressed firms* oleh PN4 Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi *outside director*, *outside blockholders*, dan kepemilikan manajerial memiliki hubungan positif dan signifikan. Untuk variabel kepemilikan saham non eksekutif dan independensi komite audit tidak berhubungan signifikan terhadap pengungkapan sukarela. Penelitian itu juga menunjukkan bahwa pengungkapan sukarela pada perusahaan yang mengalami *financial distressed* mengungkapkan informasi yang kurang dalam pengungkapan sukarela daripada perusahaan yang sehat keuangannya.

Terdapat perbedaan mendasar penelitian ini dengan sebelumnya. Pertama, penelitian ini tidak memasukkan variabel *outside director* dan *outside blockholdings* pada penelitian ini karena di Indonesia menganut *two*

tier board system yang mengenal dewan direksi dan dewan direktur. Kedua, cara mengukur variabel *financial distressed* yang berbeda, yang dimungkinkan hasilnya akan berbeda. Penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan yang mengalami *financial distressed* berdasar daftar PN4 pada Bursa Saham Malaysia yang telah menetapkan daftar perusahaan yang termasuk dalam *financial distressed firms*, maka dalam penelitian ini menggunakan definisi *financial distressed firms* yang digunakan oleh Classens et al. (1999) dalam Wardhani (2009). Perusahaan yang berada dalam kesulitan keuangan didefinisikan sebagai perusahaan yang memiliki *interest coverage ratio* (rasio antara laba operasional terhadap biaya bunga) kurang dari satu.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah penelitian dapat dirumuskan dalam pertanyaan berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan tingkat pengungkapan sukarela antara perusahaan yang mengalami *financial distressed* dengan perusahaan *nonfinancial distressed*?
2. Apakah *financial distressed status* berhubungan dengan luas pengungkapan sukarela?
3. Apakah struktur kepemilikan dan komite audit berhubungan dengan luas pengungkapan sukarela?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengetahui perbedaan tingkat pengungkapan sukarela pada perusahaan yang mengalami *financial distressed* jika dibandingkan dengan perusahaan *nonfinancial distressed*.
2. Untuk menguji pengaruh struktur kepemilikan perusahaan terhadap luas pengungkapan sukarela.
3. Untuk menguji pengaruh komite audit terhadap luas pengungkapan sukarela.

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk memperoleh informasi tentang faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela perusahaan di Indonesia serta lebih menambah wawasan dalam mengaplikasikan konsep pengungkapan bagi perusahaan. Dapat memberikan sinyal mengenai kondisi keuangan perusahaan kepada investor sehingga investor dapat mengambil keputusan investasi dengan tepat. Selain itu juga memberikan landasan bagi penelitian selanjutnya untuk memperbaiki keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam penelitian ini.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab. Bab I merupakan pendahuluan, berisi mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang tinjauan pustaka yang menjelaskan landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Bagian ini menguraikan literatur yang terkait dengan mekanisme *corporate governance*, *distressed status*, dan luas pengungkapan sukarela.

Bab III merupakan metode penelitian yang memaparkan tentang variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode analisis yang digunakan.

Bab IV menyajikan deskripsi objek penelitian, analisis data, interpretasi hasil, dan pembahasan.

Bab V merupakan penutup yang berisi mengenai kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa teori keagenan menyangkut hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu prinsipal dan agen, dimana pemilik perusahaan atau investor menunjuk agen sebagai manajemen yang mengelola perusahaan atas nama pemilik. Manajemen diberikan wewenang dalam kebijakan pengambilan keputusan sehingga manajemen diharapkan dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada secara maksimal untuk menyejahterakan pemilik baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Teori agensi menyatakan bahwa masing-masing pihak (prinsipal dan agen) hanya termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dengan agen. Bila kedua pihak memaksimalkan perannya maka manajemen tidak akan selalu bertindak untuk kepentingan pemilik. Hal ini sangat beralasan sekali karena pada umumnya pemilik memiliki *welfare motives* yang bersifat jangka panjang sebaliknya manajemen cenderung memaksimalkan profit jangka pendek dengan mengabaikan *sustainability* keuntungan dalam jangka panjang. Prinsipal memaksa pihak manajemen untuk menyiapkan laporan keuangan sesuai standar agar dapat memonitor dan mengendalikan tindakan pihak manajemen. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda dalam perusahaan di mana

masing-masing pihak berusaha mempertahankan tingkat kemakmuran sebagai kepentingannya masing-masing. Adanya perbedaan kepentingan dan pemisahan kepemilikan perusahaan antara pemilik dan pengelola perusahaan dapat menimbulkan konflik. Penyatuan kepentingan ini sering menimbulkan masalah keagenan yang disebut dengan konflik agensi (Jensen dan Meckling, 1976).

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa konflik agensi muncul akibat adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Pemisahan ini menyebabkan adanya asimetri informasi antara *shareholders* dan manajemen, yang kemudian memungkinkan manajemen untuk mengambil kebijakan yang kurang efektif bagi perusahaan selain itu tidak adanya keterbukaan manajemen untuk mengungkapkan hasil kinerjanya pada pemilik perusahaan sehingga terdapat tata kelola perusahaan yang kurang baik. *Shareholders* sebagai pihak yang memberikan wewenang kepada manajemen untuk mengelola kekayaan mempunyai kepentingan meningkatkan kesejahteraan dirinya melalui pembagian dividen. Sedangkan pihak manajemen yang diberi tanggung jawab mengelola kekayaan perusahaan mempunyai kepentingan meningkatkan kesejahteraan dirinya melalui kompensasi. Kondisi ini menyebabkan pihak manajemen cenderung tidak memberikan informasi yang berpengaruh negatif terhadap kepentingan tersebut.

Berdasarkan keadaan tersebut, dibutuhkan sistem tata kelola perusahaan yang baik pada perusahaan yang bertujuan untuk mendorong pengelolaan perusahaan yang terbuka dan *accountable* sehingga pemegang saham mempunyai

kesempatan untuk mengkaji berbagai keputusan dan dasar pengambilan keputusan tersebut, serta menilai keefektifan keputusan yang telah diambil oleh manajemen. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa ketika perusahaan yang kepemilikannya tunggal dikelola oleh pemilik, maka pemilik akan membuat keputusan-keputusan yang memaksimalkan kepentingannya. Akan tetapi, apabila pemilik yang sekaligus merangkap sebagai manajer ini menjual sebagian sahamnya kepada pihak luar, biaya agensi akan muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara manajer dengan para pemegang saham. Biaya agensi yang timbul diantaranya adalah biaya monitoring yang dilakukan oleh pihak prinsipal. Biaya monitoring ini mencakup biaya untuk proses auditing, penganggaran, kontrol, dan sistem kompensasi agen. Karena adanya biaya agensi yang timbul, maka pihak manajemen harus dapat mengurangi biaya agensi untuk meningkatkan nilai perusahaan.

Terdapat tiga macam biaya keagenan yaitu:

- a. Biaya *Monitoring*: biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk mengawasi aktivitas dan perilaku manajer antara lain membayar auditor untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan dan premi asuransi untuk melindungi aset perusahaan.
- b. Biaya *Bonding*: biaya yang ditanggung oleh manajer untuk memberi jaminan kepada pemilik bahwa manajer tidak melakukan tindakan yang merugikan perusahaan.

c. *Residual Loss*: biaya yang ditanggung prinsipal untuk mempengaruhi keputusan manajer supaya meningkatkan kesejahteraan prinsipal.

Salah satu cara untuk mengurangi biaya agensi adalah dengan melakukan pengungkapan informasi perusahaan. Pihak manajemen diwajibkan memberikan laporan periodik kepada pihak prinsipal tentang kondisi perusahaan yang dijalankannya. Sementara pihak prinsipal akan menilai kinerja manajemennya melalui laporan keuangan yang disampaikan, sehingga laporan keuangan merupakan sarana akuntabilitas manajemen kepada pemiliknya (Rahmawati dan Mutmainah, 2007). Penilaian kinerja perusahaan tidak hanya berdasarkan kinerja keuangannya, tetapi juga berdasar kinerja nonkeuangan perusahaan. Oleh karena itu, ada persyaratan bagi pihak manajemen untuk mengungkapkan informasi nonkeuangan. Hal ini diharapkan bahwa dengan mengungkapkan informasi tambahan (yang tidak diwajibkan) agen dan prinsipal dapat mengurangi biaya agensi (Healy dan Palepu, 1993).

2.1.2 Teori Sinyal

Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan di luar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas. Menurut Suwardjono (2008) teori sinyal (*signalling theory*) melandasi pengungkapan sukarela. Manajemen selalu berusaha untuk mengungkapkan informasi privat yang menurut pertimbangannya sangat diminati oleh investor dan pemegang saham khususnya jika informasi tersebut merupakan berita baik (*good*

news). Di samping itu, manajemen berminat menyampaikan informasi yang dapat meningkatkan kredibilitas dan kesuksesan perusahaan meskipun informasi tersebut tidak diwajibkan.

Teori sinyal menjelaskan manajemen perusahaan sebagai agen, memiliki dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan kepada pihak eksternal. Dorongan tersebut disebabkan adanya asimetri informasi atau ketidakseimbangan penguasaan informasi antara agen dengan prinsipal (konflik keagenan). Hal ini disebabkan oleh agen yang memiliki lebih banyak informasi mengenai perusahaan. Informasi perusahaan terangkum dalam laporan tahunan perusahaan yang pada umumnya dipublikasikan kepada publik, sehingga laporan tahunan menjadi penting bagi pihak eksternal perusahaan (Andayani, 2002).

Ketika perusahaan mengalami *financial distressed* maka perusahaan mempunyai *bad news* yang menunjukkan sinyal negatif bagi para investor sehingga ini akan mempengaruhi keterbukaan manajemen dalam melakukan pengungkapan, sedangkan jika perusahaan sehat keuangannya berarti perusahaan mempunyai *good news* bagi investor sehingga hal ini akan mempengaruhi pihak manajemen dalam memberikan informasi perusahaan. Manajemen berminat menyampaikan informasi yang dapat meningkatkan kredibilitasnya dan kesuksesan perusahaan meskipun informasi tersebut tidak diwajibkan. Beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh Ross (1979); Abdullah dan Nasir (2004) menunjukkan bahwa perusahaan yang sehat keuangannya cenderung untuk mengungkapkan informasi lebih banyak daripada perusahaan yang mengalami

financial distressed. Definisi *financial distressed firms* diartikan sebagai perusahaan yang menghadapi penurunan kinerja keuangan sebagai akibat manajemen yang buruk atau krisis keuangan (Wruck, 1990) dalam (Abdullah dan Nasir, 2004). Penurunan kinerja keuangan dapat ditandai dengan ekuitas yang negatif. Kinerja keuangan merupakan prestasi dan kondisi keuangan perusahaan yang dinilai dengan ukuran tertentu.

Dalam penelitian ini, *financial distressed* diukur dengan menggunakan *interest coverage ratio* (ICR). *Financial distressed* terjadi saat perusahaan tidak bisa memenuhi kewajiban jangka pendeknya, di mana perusahaan tidak bisa membayar hutang-hutangnya kepada kreditur. Pemakaian hutang akan menimbulkan kewajiban finansial yang bersifat tetap (biaya bunga) dan ICR menunjukkan apakah kewajiban tersebut dapat dipenuhi dari hasil penggunaan hutang terhadap *operating profit* (EBIT). Pengungkapan sukarela ini merupakan solusi atas kendala pengungkapan secara penuh. Dengan adanya kesediaan manajemen dalam pengungkapan sukarela ini, tingkat pengungkapan wajib yang dapat ditetapkan dapat diarahkan ke tingkat wajar atau bahkan memadai tidak perlu penuh (Suwardjono, 2008).

2.1.3 Corporate Governace

FCGI (*Forum Corporate Governance for Indonesia*) dalam publikasinya mendefinisikan *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen, pihak kreditur,

pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan mengenai tujuan dari *corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Menurut *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) penerapan *good corporate governance* juga bermanfaat untuk mengurangi *agency cost*, yaitu biaya yang harus ditanggung pemegang saham akibat pendelegasian wewenangnya kepada manajemen, menurunkan biaya modal (*cost of capital*) sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik sehingga menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkat resiko perusahaan, dan dapat meningkatkan nilai saham perusahaan, serta menciptakan dukungan *stakeholders* terhadap perusahaan.

Corporate governance biasanya mengacu pada sekumpulan mekanisme yang mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh manajer ketika ada pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian beberapa dari pengendalian ini terletak pada fungsi dari dewan direksi, pemegang saham institusional, dan pengendalian dari mekanisme pasar (Larcker et al., 2005). Mekanisme *corporate governance* dalam suatu perusahaan dapat menentukan kesuksesan perusahaan. Dewan memegang peranan yang sangat signifikan bahkan peran yang utama dalam penentuan strategi perusahaan tersebut. Indonesia merupakan negara yang menggunakan konsep *two tier*, di mana dewan terdiri dari dewan direksi dan dewan komisaris. Istilah dewan di Amerika lebih mengacu pada fungsi dari dewan

komisaris. Dalam hasil penelitian yang dilakukan di Amerika, yang dimaksud dengan dewan (*board*) adalah dewan komisaris (Wardhani, 2006). Struktur *corporate governance* yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah struktur kepemilikan perusahaan dan komite audit.

Menurut pedoman umum *corporate governance* yang dikeluarkan KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance) terdapat lima prinsip dasar pengelolaan perusahaan yang baik yaitu keadilan (*fairness*), transparansi (*transparency*), akuntabilitas, *responsibility*, dan independensi.

1. Keadilan (*fairness*). Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.
2. Transparansi (*transparency*). Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Dapat dipertanggungjawabkan (*accountability*). Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan

wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

4. Pertanggungjawaban (*responsibility*). Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.
5. Independensi. Untuk melancarkan pelaksanaan asas *good corporate governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing bagian dalam perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

2.1.4 Financial Distressed

Krisis finansial global di tahun 2008 menyebabkan dampak sangat buruk bagi perekonomian internasional. Salah satu sebabnya adalah mekanisme perusahaan dalam menerbitkan surat utang yang merupakan alternatif pendanaan yang dipilih perusahaan. Meskipun mempunyai beberapa keunggulan, berhutang bisa menyebabkan perusahaan bangkrut ketika perusahaan tidak dapat mengelola hutangnya dengan baik. Indikator yang dapat mengetahui permasalahan tersebut

adalah *financial distressed*. Kondisi *financial distressed* terjadi sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan, dengan kata lain perusahaan tidak mampu membayar kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo. Istilah umum untuk menggambarkan situasi tersebut adalah kebangkrutan, kegagalan, ketidakmampuan melunasi hutang, dan *default*. *Default* berarti suatu perusahaan melanggar perjanjian dengan kreditur dan dapat menyebabkan tindakan hukum.

Terdapat perbedaan pendapat mengenai *financial distressed* pada penelitian-penelitian terdahulu karena adanya perbedaan alat ukurnya. Menurut Platt dan Platt (2002), *financial distressed* adalah tahap penurunan kondisi keuangan yang dialami oleh suatu perusahaan, yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi. Classens et al. (1999) dalam Wardhani (2006) menggunakan *interest coverage ratio* untuk mendefinisikan *distressed*. Perusahaan yang berada dalam kesulitan keuangan sebagai perusahaan yang memiliki *interest coverage ratio* (rasio antara laba operasional terhadap biaya bunga) kurang dari satu. *Financial Distressed* terjadi saat perusahaan tidak bisa memenuhi kewajiban jangka pendek di mana perusahaan tidak dapat membayar hutang-hutangnya kepada kreditur. Pemakaian hutang akan menimbulkan biaya bunga dan *interest coverage ratio* menunjukkan apakah kewajiban tersebut dapat dipenuhi dari hasil penggunaan hutang terhadap laba operasional.

2.1.5 Luas Pengungkapan Sukarela

Laporan tahunan merupakan media bagi perusahaan untuk menyampaikan informasi perusahaan baik yang berupa kondisi keuangan maupun informasi

lainnya kepada pemegang saham, *stakeholder*, kreditor. Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). Sedangkan pengungkapan sukarela adalah pengungkapan informasi yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Pengungkapan sukarela tidak diwajibkan oleh peraturan sehingga perusahaan bebas memilih jenis informasi yang akan diungkapkan, yang dipandang manajemen relevan dalam membantu pengambilan keputusan (Yularto dan Chariri, 2003).

Menurut Hadi dan Sabeni (2002) suatu perusahaan dalam mengambil keputusan untuk melakukan pengungkapan, perusahaan akan memperhatikan manfaat dan biaya yang ditimbulkan. Bila manfaat yang akan diperoleh lebih besar dibanding biaya yang dikeluarkan maka perusahaan dengan sukarela mengungkapkan informasi perusahaan. Dengan melakukan pengungkapan sukarela perusahaan dapat meningkatkan kredibilitas pelaporan keuangan perusahaan dan untuk membantu investor dalam memahami strategi bisnis perusahaan (Yularto dan Chariri, 2003). Biaya pengungkapan sukarela merupakan seluruh biaya yang berhubungan langsung atau tidak langsung terhadap penerbitan laporan sukarela. Biaya pengungkapan sukarela dikategorikan menjadi dua yaitu:

1. Biaya langsung merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan yang berkaitan langsung dalam pengembangan dan penyajian informasi. Termasuk biaya langsung diantaranya biaya pengumpulan informasi, biaya pemrosesan, biaya pemeriksaan, dan biaya penyebaran informasi.
2. Biaya tidak langsung ialah biaya yang timbul akibat diungkapkan atau tidak diungkapkan informasi. Contohnya yaitu biaya litigasi dan biaya *propriety*/biaya *competitive disadvantage*. Biaya litigasi adalah biaya yang timbul karena pengungkapan informasi yang menyesatkan, sedangkan biaya *propriety* ialah biaya yang timbul akibat diterbitkannya laporan keuangan yang justru akan digunakan pesaing melakukan *positioning*, sehingga dapat melemahkan posisi perusahaan yang melakukan pengungkapan.

Pengukuran luas pengungkapan sukarela dalam penelitian ini menggunakan daftar pengungkapan sukarela tanpa pembobotan. Metode tanpa pembobotan dipilih karena:

1. Laporan tahunan ditunjukkan untuk pihak umum sehingga memungkinkan para pemakai mempunyai persepsi yang berbeda-beda sehingga memungkinkan adanya item suatu informasi yang dianggap penting bagi pihak tertentu tetapi tidak penting bagi pihak lain.
2. Untuk menghindari pemberian bobot secara tidak objektif terhadap item-item informasi. Hasil penelitian Chow dan Wong-Boren (1987) maupun Amalia (2005) menggunakan penskoran baik dengan pembobotan

maupun tanpa pembobotan telah berhasil membuktikan bahwa hasilnya tidak terdapat perbedaan yang signifikan.

2.1.6 Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan menggambarkan komposisi kepemilikan saham baik manajerial, institusional, asing ataupun publik dari suatu perusahaan. Menurut Hongxia dan Qi (2008) menyatakan bahwa semakin besar pihak-pihak yang terlibat dalam kepemilikan, maka potensi konflik antara prinsipal dan agen akan semakin besar dibandingkan perusahaan yang tidak memiliki kepemilikan terpisah. Pada perusahaan dengan sistem kepemilikan terpisah maka pengungkapan informasinya akan cenderung lebih luas, sehingga prinsipal akan lebih mampu untuk memonitor dan memastikan bahwa kepentingan ekonomi terlaksana baik. Eng dan Mak (2003) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial rendah, maka potensi timbulnya masalah agensi akan semakin besar. Para pemegang saham luar/institusional akan berusaha untuk memperbaiki fungsi pengawasannya terhadap perilaku manajemen dalam upaya meminimalisir masalah-masalah agensi yang mungkin timbul (Jensen dan Meckling, 1976; Nasir dan Abdullah, 2004). Pengawasan yang dilakukan oleh pemegang saham luar perusahaan akan menaikkan biaya perusahaan. Namun hal itu dapat dikurangi jika manajer menyediakan pengungkapan sukarela. Struktur kepemilikan akan mempengaruhi tingkat pengawasan yang kemudian berpengaruh pada tingkat pengungkapan sukarela (Eng dan Mak, 2003).

2.1.7 Komite Audit

Awal mulanya terbentuk Sarbanes Oxley Act (SOX) karena ada kasus Enron yang diindikasikan kurangnya pengendalian internal perusahaan. Pasal 301 dari undang-undang SOX tahun 2002 mengharuskan perusahaan untuk mempertahankan komite audit yang semua anggotanya merupakan direktur independen. Di Indonesia, terdapat peraturan BAPEPAM-LK no.IX 1.5 yang mensyaratkan bahwa setiap perusahaan publik di Indonesia wajib membentuk komite audit dengan anggota minimal tiga orang, yang diketuai oleh satu orang komisaris independen dengan dua orang eksternal yang independen terhadap perusahaan serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan.

Komite audit berperan dalam memberikan suatu pandangan tentang masalah akuntansi, laporan keuangan dan penjelasannya, sistem pengawasan internal serta auditor independen. Selain itu juga mempunyai tugas terpisah dalam membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh (publikasi FCGI).

Pada umumnya, komite audit mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang, yaitu;

a. Laporan Keuangan (*Financial Reporting*)

Tanggung jawab komite audit di bidang laporan keuangan adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usahanya, rencana, dan komitmen jangka panjang.

b. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Tanggung jawab komite audit dalam bidang *corporate governance* adalah untuk memastikan perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

c. Pengawasan Perusahaan (*Corporate Control*)

Tanggung jawab komite audit untuk pengawasan perusahaan termasuk di dalamnya pemahaman tentang masalah serta hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal. Ruang lingkup audit internal harus meliputi pemeriksaan dan penilaian tentang kecukupan dan efektifitas sistem pengawasan intern.

Ho dan Wong (2001), menggunakan data Hong Kong, menemukan hubungan signifikan positif antara independensi komite audit dan tingkat pengungkapan sukarela. Dalam laporan tahunan, memperlihatkan bahwa komite audit membantu dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya yang berhubungan dengan dewan komisaris. Dengan demikian, komite audit dapat meningkatkan pengendalian internal yang memiliki kekuatan untuk meningkatkan pengungkapan yang berhubungan dengan nilai perusahaan sekaligus meningkatkan kualitas pengungkapan sukarela.

2.2 Penelitian Terdahulu

Telah cukup banyak penelitian yang berkaitan dengan pelaporan pengungkapan sukarela yang dihubungkan dengan karakteristik perusahaan seperti ukuran perusahaan, *listing*, *leverage*, operasi perusahaan, jenis industri, dan kepemilikan manajerial (Eng dan Mak, 2003; Hadi dan Sabeni 2002; serta Nasir dan Abdullah, 2004). Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Nasir dan Abdullah (2004). Terdapat beberapa perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian ini tidak memasukkan variabel *outside director* dan *outside blockholdings* pada penelitian ini karena di Indonesia menganut *two tier board system* yang mengenal dewan direksi dan dewan direktur. Kedua, cara mengukur variabel *distressed status* yang berbeda, yang dimungkinkan hasilnya akan berbeda. Penelitian terdahulu variabel status keuangan perusahaan diukur dengan membandingkan antara perusahaan yang sehat secara keuangan dengan perusahaan yang mengalami *financial distressed* yang telah terdaftar dalam PN4 Malaysia, sedangkan penelitian ini menggunakan definisi *financial distressed firms* yang digunakan oleh Classens et al. (1999) dalam Wardhani (2009) yaitu *financial distressed firms* diukur dengan *interest coverage ratio*. Perusahaan yang memiliki *interest coverage ratio* (rasio antara laba operasional terhadap biaya bunga) kurang dari satu merupakan *financial distressed firms*. Beberapa penelitian terdahulu dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel Independen	Variabel Dependen	Sampel	Hasil Penelitian
1.	Eng dan Mak, 2003	<i>Managerial ownership, blockholder ownership, government ownership, board composition</i>	Pengungkapan sukarela	Perusahaan yang <i>listed</i> di bursa Singapura	a. Struktur kepemilikan dan komposisi dewan mempengaruhi pengungkapan sukarela b. <i>Blockholder ownership</i> tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela
2.	Hadi, Sabeni 2002	Komposisi dewan komisaris, komite audit, ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , profitabilitas, operasi perusahaan, dan jenis industry	Tingkat pengungkapan sukarela		a. Komposisi dewan komisaris, ukuran perusahaan, skala operasi perusahaan, dan jenis industri berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan sukarela b. Komite audit, <i>leverage</i> , profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela
3.	Dessy Amalia, 2005	Ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , struktur kepemilikan, ROE, PBV, besar dan umur perusahaan,	Luas pengungkapan sukarela	50 perusahaan yang tercatat di BEI tahun 2003	a. Ukuran perusahaan dan struktur kepemilikan berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan sukarela b. <i>Leverage</i> , ROE,

					PBV, basis dan umur perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan
4.	Nasir dan Abdullah, 2005	<i>Distressed status</i> , Proporsi <i>outside directors</i> , Independensi komite audit, <i>outside blockholder</i> , kepemilikan saham non-eksekutif	Tingkat pengungkapan sukarela	336 perusahaan yang listed di Bursa Malaysia	<p>a. Proporsi <i>outside director</i> dan <i>outside blockholder</i> memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap pengungkapan sukarela</p> <p>b. Independensi komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan saham non-eksekutif tidak berhubungan dengan pengungkapan sukarela.</p> <p>c. Variabel kontrol yang mempengaruhi pengungkapan sukarela hanya <i>size</i></p>
5.	Hongxia Li dan Ainan Qi, 2008	<i>Corporate governance</i> , kepemilikan manajerial	Pengungkapan sukarela	100 perusahaan yang <i>listed</i> di Shanghai dan Shenzen Stock Exchange tahun 2003-2005	<p>a. Kepemilikan manajerial yang tinggi mempunyai tingkat pengungkapan sukarela yang tinggi.</p> <p>b. Konsentrasi kepemilikan mempunyai hubungan signifikan dengan</p>

					pengungkapan sukarela
6.	Hestiono Nugrahadi, 2008	Komposisi dewan komisaris independen, kepemilikan saham manajerial, kepemilikan saham oleh <i>blockholder</i> . Variabel kontrol: <i>size</i> , <i>leverage</i> , reputasi auditor, ROA	Indeks Pengungkapan Sukarela	Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2005	a. Penelitian ini tidak menemukan bukti adanya pengaruh komposisi dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan <i>blockholder</i> terhadap pengungkapan sukarela. b. Tidak menemukan bukti adanya pengaruh ukuran perusahaan, <i>leverage ratio</i> , reputasi auditor, dan ROA terhadap pengungkapan sukarela

Sumber: berbagai penelitian terdahulu

2.3 Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

2.3.1 *Financial Distressed* dan Pengungkapan Sukarela

Teori sinyal memprediksi bahwa *healthy firms* cenderung untuk mengungkapkan informasi lebih banyak daripada *financial distressed firms* (Ross, 1979) dalam Nasir dan Abdullah (2004). Definisi *financial distressed firms* diartikan sebagai perusahaan yang menghadapi penurunan kinerja keuangan sebagai akibat manajemen yang buruk atau krisis keuangan (Wruck, 1990) dalam (Abdullah dan Nasir, 2004). Penurunan kinerja keuangan dapat ditandai dengan ekuitas yang negatif. Kinerja keuangan merupakan prestasi dan kondisi keuangan

perusahaan yang dinilai dengan ukuran tertentu. Timbulnya *financial distressed* seperti yang dikemukakan para peneliti karena tidak ada atau kurangnya upaya mengawasi kegiatan operasional perusahaan, akibatnya perusahaan kekurangan dana untuk membayar gaji, utang (Mackey, 1983); utang yang berlebihan (*highly leverage*), modal yang tidak mencukupi, penurunan kinerja keuangan, kualitas manajemen yang rendah (Fejerstein, 1996). Dengan adanya kinerja manajemen yang buruk, hal ini mendorong pihak manajemen untuk mengungkapkan informasi perusahaan yang kurang. Ini dilakukan untuk menutupi kinerja perusahaan yang buruk agar nilai perusahaan tidak turun di mata *stakeholder*. Ketika perusahaan mengalami *financial distressed* maka perusahaan berupaya untuk tidak memperlihatkan kondisi tersebut secara transparan, dengan cara mengurangi kelengkapan informasi perusahaan kepada publik dalam laporan tahunan. Oleh karena itu, manajer yang perusahaannya mengalami *financial distressed* cenderung mengurangi kelengkapan pengungkapan sukarela agar laporan kinerja perusahaan terlihat baik di mata *stakeholder* maka nilai perusahaan akan tetap terjaga.

Beberapa penelitian mengungkapkan perusahaan yang mengalami *financial distressed* ialah perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dan tidak mampu membayar kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo (Classens et al., 1999; Wardhani, 2006). Nasir dan Abdullah (2004) dalam penelitiannya juga menemukan bahwa *distressed firms* akan mengeluarkan pengungkapan sukarela lebih rendah daripada *healthy firms*. Dari pernyataan di atas, ditarik hipotesis:

H1: Perusahaan yang mengalami *financial distressed* mempunyai luas pengungkapan sukarela yang lebih rendah daripada perusahaan *nonfinancial distressed*.

2.3.2 Komite Audit dan Pengungkapan Sukarela

Collier (1993) berpendapat bahwa komite audit membantu untuk memastikan akuntansi keuangan dan sistem pengawasan bekerja dengan baik. Peran komite audit berkembang dari tahun ke tahun untuk memenuhi kebutuhan dan perubahan lingkungan bisnis. Tanggung jawab komite audit di bidang laporan keuangan adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usahanya, rencana, dan komitmen jangka panjang.

Ho dan Wong (2001), menggunakan data Hong Kong, menemukan hubungan signifikan positif antara independensi komite audit dan tingkat pengungkapan sukarela. Hadi dan Sabeni (2002) menyatakan bahwa komite audit sebagai mekanisme pengawasan yang secara sukarela dibentuk dalam situasi *agency cost* yang tinggi untuk memperbaiki kualitas informasi antara prinsipal dan agen. Oleh karena itu, manajer yang bertindak sebagai agen akan mengungkapkan informasi perusahaan lebih terbuka sebagai bentuk keefektifan kinerja komite audit. Komite audit yang efektif dapat meningkatkan pengendalian internal yang memiliki kekuatan untuk meningkatkan pengungkapan yang

berhubungan dengan nilai perusahaan dan meningkatkan pengungkapan sukarela.

Dengan demikian, hipotesis berikut diusulkan:

H2: Komite audit berpengaruh positif dengan luas pengungkapan sukarela.

2.3.3 Kepemilikan Manajerial dan Pengungkapan Sukarela

Menurut Hongxia dan Qi (2008) perusahaan dengan tingkat kepemilikan manajerial yang tinggi memiliki tingkat pengungkapan sukarela yang tinggi. Kepemilikan manajerial adalah situasi di mana manajer sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. dalam laporan keuangan, keadaan ini ditunjukkan dengan besarnya persentase kepemilikan saham perusahaan oleh dewan komisaris, dewan direksi yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Perusahaan dengan kepemilikan manajerial di mana manajer yang bertugas menjalankan perusahaan sekaligus menjadi pemegang sahamnya tentu akan menyelaraskan kepentingannya. Jika suatu perusahaan memiliki kepemilikan manajerial yang tinggi, manajer jauh lebih peduli tentang kepentingan pemegang saham dan opsi saham akan memiliki insentif untuk kontribusi perusahaan. Dengan demikian, struktur modal dengan kepemilikan manajerial tinggi menurunkan biaya keagenan dan meningkatkan pengungkapan sukarela. Besarnya kepemilikan saham manajer dapat mengurangi *agency cost* karena berfungsi untuk menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham lain (Jensen dan Meckling, 1976). Hal ini karena kepemilikan manajerial yang lebih besar

menyebabkan saham yang dimiliki *stakeholder* lebih kecil sehingga akan mengurangi *agency cost*.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis ketiga dapat dirumuskan sebagai berikut:

H3: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela.

2.3.4 Kepemilikan Institusional dan Pengungkapan Sukarela

Kepemilikan institusional adalah hak atas kepemilikan perusahaan yang dimiliki oleh investor institusional. Adanya kepemilikan oleh investor institusional seperti asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan oleh institusi keuangan lain akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja perusahaan. Institusi keuangan memiliki sumber daya, kemampuan, dan kesempatan untuk mengawasi manajer agar lebih berfokus pada nilai perusahaan dalam jangka panjang. Investor institusional yang memiliki proporsi besar dalam kepemilikan saham perusahaan dapat mendesak agar manajer melakukan pengungkapan sukarela dan memaksakan tujuan investasi mereka dengan memberikan usul dan saran pada pihak manajer.

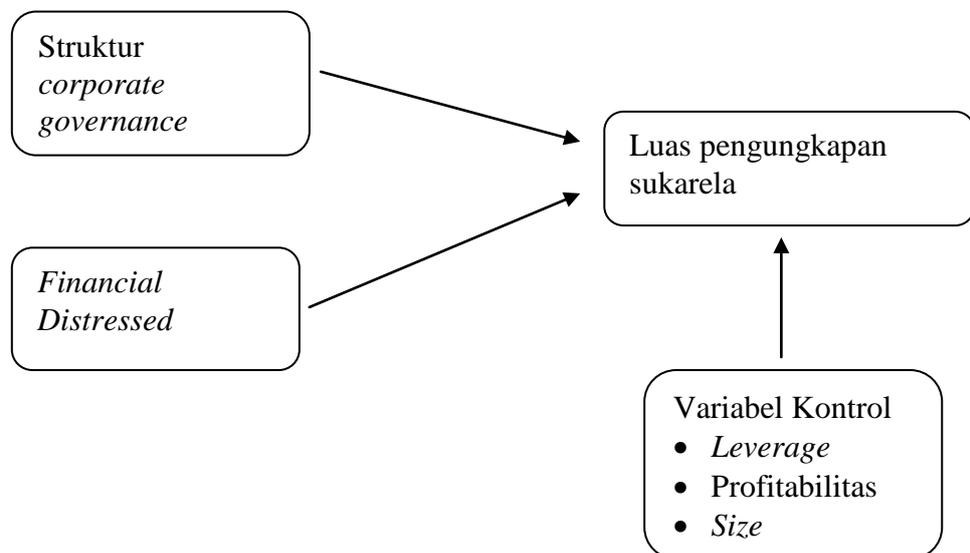
Apabila kepemilikan saham terkonsentrasi, pemilik paling besar dapat memainkan peranan dalam pengawasan manajemen. Menurut Shleifer dan Vishny (1997) pemilik saham besar dapat melakukan pengawasan karena dapat memperoleh informasi dan mengawasi manajemen serta mempunyai hak suara

untuk menekan manajemen. Pengawasan yang tinggi dari pihak luar terhadap manajemen akan menuntut perusahaan untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas. Hal ini dikarenakan laporan keuangan merupakan sumber informasi penting bagi perusahaan dan informasi tersebut digunakan dalam perencanaan dan evaluasi (Rachmawati, 2009).

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dapat dirumuskan:

H4: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela.

**Model kerangka pemikiran
Gambar 2.1**



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan variabel dependen, variabel independen, dan variabel kontrol. *Leverage*, profitabilitas, ukuran perusahaan (*size*) menjadi variabel kontrol yang mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela dalam penelitian ini. Komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan insitutional sebagai variabel independen, sedangkan luas pengungkapan sukarela sebagai variabel dependen.

3.1.1 Variabel Dependen

Dalam penelitian ini, variabel dependen adalah luas pengungkapan sukarela yang diproksikan dengan Indeks Pengungkapan Sukarela (IPS). Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan informasi yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Indeks pengukuran pengungkapan sukarela dilakukan dalam dua tahap, yaitu (1) mengembangkan daftar item pengungkapan sukarela dan (2) mengukur skor pengungkapan sukarela terhadap sampel laporan tahunan. Daftar item pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan dikembangkan berdasarkan item pengungkapan Botosan (1997) dan disesuaikan dengan item pengungkapan wajib menurut peraturan Bapepam tentang laporan tahunan (Kep-134/BL/2006).

Daftar item yang dikembangkan tersebut kemudian digunakan untuk mengukur skor pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan sampel. Penentuan skor pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan dilakukan mengikuti skor oleh Botosan (1997) yaitu penskoran pengungkapan tanpa pembobotan. Pertimbangan dalam menerapkan metode yang dipakai oleh Botosan adalah karena Botosan telah melakukan pengujian reliabilitas dan validitas atas indeks dalam penyusunan indeks pengungkapan sukarela dan hasilnya menunjukkan bahwa indeks pengungkapannya reliabel dan valid.

Item-item pengungkapan sukarela yang lebih lengkap tercantum pada lampiran A. Skor pengungkapan maksimum mencerminkan seluruh item pengungkapan yang diharapkan diungkap oleh perusahaan dalam laporan tahunannya. Indeks pengungkapan merupakan perbandingan antara skor total pengungkapan dengan skor pengungkapan maksimum yang dicapai oleh suatu perusahaan (Amalia, 2005).

$$IPS = \frac{\text{jumlah item pengungkapan sukarela perusahaan}}{\text{total indeks pengungkapan sukarela}}$$

3.1.2 Variabel Independen

Dalam penelitian ini yang berfungsi sebagai variabel independennya adalah:

1. *Financial Distressed*

Financial distressed terjadi karena perusahaan tidak mampu membayar kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo. Pada penelitian ini dalam

mengukur perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan (*financial distressed firms*) dengan menggunakan *interest coverage ratio* (ICR) yang berdasar pada penelitian Classens (1999). Untuk perusahaan yang mempunyai *interest coverage ratio* kurang dari satu dinyatakan sebagai *financial distressed firms*. Rasio *interest coverage* dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ICR} = \frac{\text{Operating Profit}}{\text{Interest Expend}}$$

Keterangan:

ICR < 1, berarti perusahaan mengalami *financial distressed* yang disimbolkan dalam *dummy* 1,

ICR > 1, berarti perusahaan tidak mengalami *financial distressed* atau termasuk *healthy firms*, disimbolkan dengan *dummy* 0.

2. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah situasi di mana pihak manajer sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Dalam laporan keuangan, keadaan ini ditunjukkan dengan besarnya persentase kepemilikan saham perusahaan oleh dewan direksi dan komisaris (manajerial) yang diungkapkan dalam laporan tahunan.

3. Kepemilikan Institusional

Menunjukkan persentase saham yang dimiliki oleh investor institusional yang dimiliki oleh institusi keuangan seperti asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan oleh institusi keuangan lain. Variabel kepemilikan institusi diukur dari jumlah persentase saham yang dimiliki oleh institusi keuangan.

Variabel ini akan menggambarkan tingkat kepemilikan saham oleh institusi keuangan dalam perusahaan (Agrawal dan Knouber, 1996) dalam (Rachmawati, 2009).

4. Komite Audit

Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usahanya, rencana dan komitmen jangka panjang; memastikan perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan; memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal.

3.1.3 Variabel Kontrol

Penelitian ini menggunakan tiga variabel kontrol yaitu *leverage*, *size*, dan profitabilitas. Tujuan penggunaan variabel kontrol adalah mengendalikan pengaruh faktor-faktor yang mungkin dapat mengacaukan analisis.

1. *Leverage*

Rasio *leverage* penting untuk menilai kemampuan perusahaan melunasi semua hutang-hutangnya. Perusahaan yang mempunyai proporsi utang lebih banyak dalam struktur permodalannya akan mempunyai biaya keagenan yang lebih besar. Oleh karena itu, perusahaan yang mempunyai *leverage* tinggi

mempunyai kewajiban lebih untuk memenuhi kebutuhan informasi krediturnya (Suripto, 1999). Pemberian informasi yang lebih banyak ini bertujuan untuk memudahkan perolehan tambahan dana dengan biaya murah baik dari perolehan hutang maupun dari penerbitan saham, untuk program pendanaan berikutnya. Rasio *leverage* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$LEVERAGE = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Aktiva}}$$

2. *Size*

Hubungan antara ukuran perusahaan dengan tingkat pengungkapan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Perusahaan besar umumnya menjadi sorotan banyak pihak, baik dari masyarakat secara umum maupun pemerintah. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar relatif lebih diawasi oleh lembaga-lembaga pemerintah, sehingga mereka berupaya menyajikan pengungkapan yang lebih baik untuk dapat meminimalisasi tekanan-tekanan pemerintah (Tjakradinata, 2000). Oleh karena itu, perusahaan besar tersebut dituntut untuk mengungkapkan informasi yang lebih banyak daripada perusahaan kecil.
- b. Perusahaan besar memiliki sumber daya yang besar. Dengan sumber daya yang besar tersebut, perusahaan perlu dan mampu membiayai penyediaan informasi untuk keperluan internal. Informasi itu sekaligus menjadi bahan untuk keperluan pengungkapan informasi kepada pihak eksternal, sehingga tidak perlu ada tambahan biaya yang besar untuk

dapat melakukan pengungkapan dengan lebih lengkap. Sebaliknya, perusahaan dengan sumber daya yang relatif kecil mungkin tidak memiliki informasi siap saji sebagaimana perusahaan besar (Tjakradinata, 2000). Dengan demikian, biaya pengumpulan, pemrosesan, dan penyajian informasi pada perusahaan besar merupakan suatu kebutuhan yaitu untuk kepentingan pelaporan internal dan eksternal perusahaan, sehingga pengungkapan informasi bagi perusahaan besar bukanlah suatu masalah.

- c. Perusahaan besar berkemungkinan memperoleh keuntungan-keuntungan dengan mengungkapkan informasi yang memadai dalam laporan tahunan, misalnya kemudahan untuk memasarkan saham dan kemudahan memperoleh dana dari pasar modal. Sedangkan perusahaan kecil umumnya sulit untuk mendapatkan dana dari pasar modal, mengingat pembatasan ukuran aset bila terjun ke bursa, sehingga perusahaan kecil tidak dapat menikmati keuntungan dari pengungkapan informasi yang memadai (Tjakradinata, 2000).

Semua alasan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan besar mempunyai insentif untuk memberikan pengungkapan sukarela lebih luas dibanding perusahaan kecil. Variabel ukuran perusahaan merupakan variabel yang paling konsisten berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan dalam penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan Cerf (1961), Shingvi and Desai (1971), Suripto (1999), Gunawan (2000), dan

Tjakradinata (2000). Proksi yang digunakan dalam variabel ini adalah log natural total aktiva perusahaan.

Size = Log Natural (Total Aktiva)

3. Profitabilitas

Amalia (2005) menunjukkan bahwa profitabilitas, perusahaan yang dikelola dengan baik memiliki dorongan untuk membedakan perusahaan dari profitabilitas perusahaan yang rendah dalam rangka meningkatkan modal pada jangka waktu yang tersedia paling baik dengan melakukan pengungkapan sukarela. Manajer termotivasi untuk mengungkapkan informasi lebih rinci untuk mendukung kontinuitas posisi dan remunerasi mereka (Singhvi dan Desai, 1971). Jadi, perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi lebih bersedia mengungkapkan informasi sukarela. Haniffa dan Cooke (2002) menemukan hubungan positif dan signifikan antara profitabilitas perusahaan dan tingkat pengungkapan sukarela. Informasi ini mendukung hipotesis teori sinyal, yang menyatakan bahwa perusahaan dengan informasi perusahaan yang bagus (*good news*) lebih mungkin untuk mengungkapkan informasi tambahan (Ross, 1979).

$$ROA = \frac{EAT}{Total\ Aset}$$

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar (*listing*) di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2007 dan 2008. Metode

pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel secara tidak acak yang mempunyai tujuan atau target tertentu. Adapun kriteria-kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. Pengambilan sampel dari perusahaan publik yang memiliki rasio *interest coverage* kurang dari satu dan perusahaan pasangannya yang rasio *interest coverage* lebih dari satu, dan dalam industri yang sama.
2. Perusahaan yang tidak memiliki data laporan keuangan yang digunakan untuk mengukur ICR dikeluarkan dari sampel.
3. Perusahaan yang termasuk dalam bidang *banking, credit, securities, insurance, holding, and other investment companies* tidak dimasukkan dalam sampel.

3.3 Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan yang listing di BEI, data *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD). Laporan yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan tahunan perusahaan periode 2007-2008. Laporan tahunan tersebut didapat di pojok BEJ Undip Semarang maupun *website* resmi perusahaan atau BEI melalui internet (www.jsx.co.id) data yang dikumpulkan dalam bentuk *softcopy*.

3.4 Metode Analisis

3.4.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan variabel-variabel dalam penelitian. Statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah rata-rata (*mean*), nilai maksimum (*max*), minimum (*min*), dan standar deviasi.

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

3.4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen, keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini digunakan normal *probability plot* dan uji Kolmogorov-Smirnov untuk menguji normalitas.

Normal *probability plot* membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2006). Dalam penelitian ini digunakan uji K-S karena uji ini dapat secara langsung menyimpulkan apakah data yang ada terdistribusi normal secara statistik atau tidak.

3.4.2.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk mengetahui apakah tiap-tiap variabel independen saling berhubungan secara linier. Multikolonieritas terjadi apabila antara variabel-variabel independen terdapat hubungan yang signifikan. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi yaitu dilihat dari nilai R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2006). Cara kedua yaitu dengan menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,90). Hal ini merupakan indikasi adanya multikolonieritas. Tidak adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen tidak berarti bebas dari multikolonieritas. Multikolonieritas disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen.

Ada atau tidaknya multikolonieritas juga dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya *variance inflation factor* (VIF). Nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi ($VIF = 1/tolerance$). Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *tolerance* dan VIF, tetapi belum dapat mengetahui variabel-variabel independen apa saja yang berkorelasi. Model regresi yang baik tidak terdapat masalah multikolonieritas atau ada hubungan korelasi antar variabel independennya.

3.4.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini terjadi karena adanya residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi lain (Ghozali, 2006).

Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi, dilakukan dengan menggunakan alat analisis Durbin-Watson. Skala pengujian autokorelasi didasarkan pada nilai tabel Durbin Watson, sehingga diketahui nilai d_l dan d_u dengan mencari berdasarkan banyak variabel (k) dan banyak sampel (n).

3.4.2.4 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji adanya ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain dalam suatu model regresi. Jika *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang bebas dari heterokedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik plot antara ZPRED (dependen) dan SRESID (residual). Jika terjadi pola tertentu, maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas. Dan sebaliknya jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titiknya menyebar, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

Analisis dengan grafik plots memiliki kelemahan yang cukup signifikan karena jumlah pengamatan mempengaruhi hasil plotting. Oleh karena itu diperlukan uji statistik yang lebih dapat menjamin keakuratan hasil. Pada penelitian ini juga dilakukan uji Park untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas dengan cara meregres nilai logaritma dari kuadrat residual terhadap variabel independen. Suatu model dikatakan bebas dari heterokedastisitas apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi secara statistik tidak signifikan atau nilai probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5% (Ghozali, 2006).

3.5 Pengujian Hipotesis

3.5.1 Paired Sample T-Test

Penelitian ini menggunakan paired sample t-test, karena sampel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sampel berpasangan. Menurut Santoso (2010) paired sample t-test digunakan untuk membandingkan *mean* dari suatu sampel yang berpasangan (*paired*). Sampel berpasangan adalah sebuah kelompok sampel dengan subyek yang sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda, seperti dalam penelitian ini, 36 sampel *financial distressed firms* dipasangkan dengan 36 *nonfinancial distressed firms*. Uji ini digunakan untuk menguji hipotesis pertama, yaitu apakah perusahaan yang mengalami *financial distressed* mempunyai luas pengungkapan sukarela lebih rendah daripada perusahaan *nonfinancial distressed*.

Rumus paired sample test:

$$t = \frac{D}{\left\{ \frac{SD}{\sqrt{N}} \right\}}$$

Keterangan:

t: nilai hitung

D: rata-rata selisih pengukuran 1 & 2

SD: standar deviasi selisih pengukuran 1 & 2

N: jumlah sampel

Apabila:

- T-hitung > t-tabel maka akan berbeda secara signifikan (H_0 Ditolak)
- T-hitung < t-tabel maka tidak berbeda secara signifikan (H_0 Diterima)

3.5.2 Analisis Regresi Berganda

Multiple regression analysis digunakan untuk mengetahui kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan luas pengungkapan sukarela. Pengujian ini digunakan untuk menguji hipotesis apakah masing-masing variabel independen (komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial) mempengaruhi luas pengungkapan sukarela. Hasil pengujian tersebut akan memberikan dasar bagi penerimaan atau penolakan hipotesis penelitian. Dengan asumsi hipotesis penelitian diterima, kesimpulan mengenai hipotesis setiap variabel independen ditentukan oleh tanda positif/negatif dan signifikansi

koefisien regresi variabel-variabel. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$IPS = \beta_0 + \beta_1 Dist + \beta_2 KA_i + \beta_3 KM_i + \beta_4 KI_i + \varepsilon$$

Keterangan:

IPS : luas pengungkapan sukarela.

DIST : *financial distressed* merupakan variabel *dummy* bernilai 1 untuk *distressed firms* dan 0 untuk *healthy firms*

KA : komite audit diukur dengan menghitung jumlah anggota komite audit dalam perusahaan.

KM : kepemilikan manajerial dihitung dari jumlah persentase kepemilikan manajerial perusahaan.

KI : variabel kepemilikan institusional diukur dari jumlah persentase saham yang dimiliki oleh institusi pada akhir tahun. Variabel ini akan menggambarkan tingkat kepemilikan saham oleh institusi lain dalam perusahaan.

ε : standar *error*

i : perusahaan 1 sampai i.

3.5.2.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model untuk menerangkan variasi variabel independen. Dalam Ghozali (2006), nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen.

3.5.2.2 Uji F

Uji statistik F bertujuan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Penentuan penerimaan atau penolakan hipotesis sebagai berikut:

1. Apabila probabilitas $> 0,05$, maka semua variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen.
2. Apabila probabilitas $< 0,05$, maka semua variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.

3.5.2.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji beda t-test digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara individual (parsial) dalam menerangkan variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan yang digunakan dalam uji t adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitas signifikansi $> 0,05$, maka hipotesis ditolak. Ini mempunyai arti bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (luas pengungkapan sukarela).
2. Jika nilai probabilitas signifikansi $< 0,05$, maka hipotesis diterima. Ini berarti bahwa variabel independen (*distressed status*, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komite audit) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (luas pengungkapan sukarela).